

Pendidikan

dalam dunia yang multibahasa



Naskah
tentang Sikap
UNESCO
mengenai
Pendidikan



Diterbitkan di tahun 2003 oleh UNESCO
(Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan)
7, place de Fontenoy, 75007 Paris (Perancis)
www.unesco.org/education

KOORDINASI REDAKSI NASKAH INGGRIS: LINDA KING

UCAPAN TERIMAKASIH

BANYAK ORANG TELAH MEMBENTUK NASKAH SIKAP INI DENGAN KOMENTAR DAN IURAN MEREKA.
SECARA KHUSUS UNESCO INGIN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA:

AYO BAMBOSE, ANNIE BRISSET, LOUIS-JEAN CALVET, ERNESTO COUDER, DENIS CUNNINGHAM, TARCISION
DELLA SENTA, NADINE DUTCHER, JUAN CARLOS GODENZZI, MARIA CARME JUNYENT, IRINA KHALEEVA,
LACHMAN M. KHUBCHANDANI, DON LONG, FELIX MARTI, MIRIAN MASAQUIZA, ELITE OLSTHAIN,
HENRIETTE RASMUSSEN, DONALL O RIAGAIN, SUZANNE ROMAINE, ADAMA SAMASSEKOU, TOVE SKUTNABB-
KANGAS.

UCAPAN TERIMAKASIH KHUSUS DISAMPAIKAN KEPADA DOERTHE BUEHMANN UNTUK BANTUANNYA
DALAM PENELITIAN LATARBELAKANG.

@ UNESCO 2003
Bahasa Inggris, dicetak
di Perancis
(ED-2003/WS/2)
Bahasa Indonesia, 2005.
dicetak di Jakarta

Pendidikan

dalam dunia yang multibahasa

Naskah
tentang
Sikap UNESCO
mengenai
Pendidikan 2003
(Bahasa Indonesia, 2005)

Daftar Isi

Pendahuluan	6
Bagian I. Keadaan multibahasa: Tantangan bagi sistem pendidikan	8
Bagian II. Kerangka normatif untuk bahasa-bahasa dan pendidikan	16
A. Instrumen penentuan standard PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)	18
B. Deklarasi dan konvensi UNESCO	19
C. Hasil konperensi internasional	20
Bagian III. Pedoman UNESCO untuk bahasa dan pendidikan	22
Bacalah Catatan Kaki (footnotes): 1 sampai dengan 39!	28

Prakata

Pendidikan Untuk Semua (PUS) berarti suatu pendidikan berkualitas untuk semua orang. Di dunia sekarang ini, hal itu berarti memberikan perhatian pada banyak ragam keadaan budaya dan bahasa yang terdapat di dalam masyarakat kontemporer. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi para pembuat kebijakan yang di satu pihak peduli pada penjaminan kualifikasi yang bersifat normatif bagi semua penduduk suatu negara, sedangkan pada waktu yang bersamaan melindungi hak untuk berbeda dari mereka yang termasuk penduduk dengan bahasa dan etnik tertentu. Ekonomi dan masyarakat yang semakin mendunia, terlebih lagi didorong oleh pengetahuan digital, membuat tantangan ini lebih rumit. UNESCO mempunyai suatu komitmen pada nilai yang inheren dari keberagaman budaya dan kebutuhan untuk memeliharanya. Pendidikan adalah suatu alat bagi dan suatu refleksi dari keberagaman budaya. Di samping itu, penelitian telah menunjukkan bahwa peserta didik belajar terbaik dalam bahasa ibunya sebagai sesuatu yang mendahului dan melengkapi pendekatan pendidikan dwibahasa.

Naskah ini, Pendidikan dalam Dunia yang Multibahasa, bertujuan untuk menjelaskan beberapa konsep dan isu kunci di sekitar pembahasan dan perdebatan itu, dan menyajikan dalam bentuk yang sederhana dan sintesis, banyak deklarasi dan rekomendasi yang membuat rujukan pada isu-isu bahasa dan pendidikan. Hal-hal ini dinyatakan sebagai pedoman dan prinsip UNESCO. Hal itu merupakan buah perbincangan dan diskusi selama banyak pertemuan internasional dan konperensi PBB dan UNESCO, dan mengenai keahlian yang perlu dalam dunia kebijakan bahasa dan pendidikan. Suatu pertemuan kelompok pakar di Paris dalam bulan September 2002* memperkaya dokumen asli atau yang semula, sambil berfungsi pula untuk menjelajahi lebih lanjut peranan UNESCO di bidang ini.

Kami berharap bahwa naskah ini akan melayani pembentukan pemikiran Negara-negara Anggota di seluruh dunia tentang persoalan bahasa dan pendidikan, dan kami mendorong penerjemahan naskah ini ke dalam sebanyak mungkin bahasa.

* Dukungan keuangan untuk pertemuan ini yang diterima dari Komisi Nasional Finlandia untuk UNESCO sangat dihargai dan dinyatakan dengan ucapan terimakasih.

Pendahuluan

UNESCO memegang peranan penting untuk dimainkannya, yakni menyediakan kerangka internasional untuk kebijakan dan praktik pendidikan tentang isu-isu kunci dan yang rumit. Bahasa, dan secara khusus pemilihan bahasa pengantar dalam pendidikan merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dan hal ini sering menimbulkan posisi-posisi yang kontras dan yang terasa mendalam. Persoalan-persoalan jatidiri atau identitas, kebangsaan dan kekuasaan terkait erat dengan penggunaan bahasa tertentu di ruang kelas. Terlebih-lebih, bahasa itu sendiri memiliki dinamika tersendiri dan tak henti-hentinya mengalami, baik proses kontinuitas maupun perubahan, yang berdampak pada tata cara komunikasi berbagai masyarakat dalam perkembangannya. Para pembuat kebijakan pendidikan menghadapi kesulitan dalam menetapkan keputusan berkenaan dengan bahasa, persekolahan dan kurikulum di mana yang teknis dan politis sering tumpang-tindih. Walaupun terdapat alasan pendidikan yang kuat yang menguntungkan pengajaran bahasa ibu (atau bahasa pertama), suatu keseimbangan yang hati-hati juga perlu dibuat antara memberdayakan orang-orang untuk menggunakan bahasa lokal dalam belajar, dan menyediakan akses pada bahasa-bahasa komunikasi dunia melalui pendidikan. Maksud dari naskah sikap ini, dengan demikian, adalah untuk mempertimbangkan beberapa isu sentral tentang bahasa dan pendidikan serta menyediakan pedoman dan prinsip yang berhubungan dengan itu. Dengan berbuat demikian, kita menyadari akan kebutuhan untuk suatu pernyataan yang jelas tentang kebijakan bahasa dalam hubungannya dengan pendidikan, secara khusus di dalam konteks Pendidikan Untuk Semua dan dalam pengertian tujuan Dakar untuk menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak mempunyai akses pada pendidikan dasar berkualitas dan bahwa terdapat suatu peningkatan 50 persen dari keaksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015 itu.

Di tahun 1953, UNESCO menerbitkan laporan ahli tentang *The Use of Vernacular Languages in Education* (Penggunaan Bahasa-bahasa Daerah/Rakyat dalam Pendidikan) dan laporan ini merupakan dokumen UNESCO yang paling sering dikutip tentang isu-isu bahasa dalam pendidikan. Perubahan-perubahan yang signifikan telah berlangsung selama limapuluh tahun yang lalu, namun: terdapat transformasi politik yang besar ke arah kebijakan bahasa baru, khususnya di negara-negara pascapenjjajahan dan yang baru merdeka; ratusan bahasa telah hilang di seluruh dunia dan banyak lagi yang masih dalam bahaya atau terancam; gerakan-gerakan migrasi dengan skala besar telah membawa bahasa-bahasa baru dan beragam ke negara-negera dan benua-benua lain; internet secara dramatis mempengaruhi cara di mana bahasa dan bahasa-bahasa digunakan untuk komunikasi dan tentu juga untuk belajar; dan globalisasi yang melaju cepat semakin menantang eksistensi berlanjut dari banyak identitas kecil dan lokal yang sering didasarkan pada bahasa. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi UNESCO untuk mempertimbangkan sikapnya tentang bahasa-bahasa dan pendidikan.

Naskah sikap ini dibagi atas tiga bagian yang terpisah. Di Bagian I, kami menyajikan pengertian-pengertian kunci yang digunakan berhubungan dengan pendidikan multibahasa. Tujuannya adalah untuk memperjelas seperangkat makna dan istilah yang digunakan terkait dengan bahasa-bahasa dan pendidikan. Di Bagian II, kami menyajikan suatu sintesis kerangka normatif untuk bahasa-bahasa dan pendidikan yang didasarkan, pertama, pada suatu analisis instrumen penentuan standard PBB; ke dua, pada suatu diskusi mengenai konvensi dan deklarasi UNESCO tertentu yang membuat rujukan pada isu-isu bahasa dan kebudayaan; dan ke tiga, pada hasil dan rekomendasi konperensi-konperensi internasional yang terkait, langsung atau tidak langsung, dengan isu-isu bahasa dan pendidikan. Bagian III dari naskah sikap ini menyediakan suatu sintesis dari banyak diskusi dan kesepakatan tentang isu-isu bahasa yang sudah diterima dan disahkan di bawah bantuan, baik PBB maupun UNESCO. Hal ini ditempatkan dalam suatu perangkat pedoman dan prinsip dengan tujuan untuk membuat sikap UNESCO jelas dan tersedia untuk dapat dibagikan secara lebih luas dalam borang atau format yang lebih berterima.

Keada
multiba
tantang
bagi sis
pendidi

an hasa an stem kan

Di banyak negara di dunia ini, pendidikan berlangsung dalam keadaan multibahasa. Kebanyakan masyarakat pluribahasa (*pluri-plural-majemuk*) sudah mengembangkan suatu *etos* yang membuat seimbang dan menghormati penggunaan bahasa yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif masyarakat-masyarakat ini dan komunitas-komunitas bahasa sendiri, aliran multibahasa lebih merupakan suatu cara hidup daripada suatu masalah untuk dipecahkan. Tantangan adalah pada sistem pendidikan untuk menyesuaikan pada kenyataan yang rumit ini dan menyediakan pendidikan berkualitas yang mempertimbangkan kebutuhan pelajar-pelajar dengan serentak menyeimbangkan hal-hal ini dengan permintaan sosial, budaya dan politik. Walaupun solusi yang seragam untuk masyarakat-masyarakat majemuk mungkin, baik administratif maupun manajerial, lebih sederhana, namun tidak dihiraukannya risiko-risiko yang tersangkut, baik dalam pengertian prestasi belajar maupun hilangnya keberagaman bahasa dan budaya. Di dalam bagian dokumen ini kita diskusikan beberapa isu dasar di sekitar penyediaan pendidikan dalam suasana bahasa yang beragam.

Keberagaman bahasa dan aliran multibahasa

Keberagaman bahasa menggambarkan adanya banyak bahasa yang diucapkan di dunia ini yang dengan berbagai cara diperkirakan antara 6.000 dan 7.000 bahasa. Untuk melindungi keberagaman hari ini merupakan suatu tantangan yang paling mendesak yang dihadapi dunia kita. Perkiraan menyatakan bahwa sedikitnya separuhnya berada dalam keadaan bahaya untuk menghilang di tahun-tahun yang akan datang.¹ Walaupun beberapa negara berbahasa homogen, seperti Iceland, banyak negara dan kawasan memamerkan suatu kekayaan keberagaman bahasa, umpamanya Indonesia dengan lebih dari 700 bahasa, dan Papua Nugini dengan lebih dari 800 bahasa.² Pembagian keberagaman bahasa secara nyata memang tidak merata. Lebih dari 70 persen dari semua bahasa di dunia ini ditemukan hanya dalam 20 negara-bangsa, di antaranya beberapa negara termiskin di dunia. Namun, pada umumnya, keadaan dwibahasa dan multibahasa, yakni kehadiran kelompok-kelompok bahasa yang berbeda yang bermukim di negara yang sama merupakan norma dan bukan pengecualian di seluruh dunia, baik di Utara maupun di Selatan. **Aliran dwibahasa dan multibahasa**, yakni penggunaan lebih dari satu bahasa di dalam kehidupan sehari-hari merupakan praktik biasa dalam keadaan ini.

Keadaan beragam bahasa meliputi suatu rentang skenario. Namun, berbicara secara luas, hal-hal ini sesuai, baik pada suasana beragam yang lebih tradisional di mana beberapa atau malah lebih dari ratusan bahasa yang digunakan di suatu kawasan selama masa yang lama maupun pada perkembangan yang lebih baru (khususnya dalam konsentrasi perkotaan), hasil gejala migrasi, di mana di beberapa sekolah kota mungkin sebanyak 30 sampai 40 jenis bahasa ibu yang berbeda digunakan oleh para siswa. Dalam semua hal ini, terdapat keperluan untuk mempertimbangkan kebutuhan belajar anak-anak secara khusus dikaitkan dengan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan di rumah dan yang di sekolah.

Bahasa-bahasa minoritas dan mayoritas

Pengertian keberagaman bahasa itu sendiri sebenarnya relatif, dan biasanya hal itu diukur dipandang dari segi batas-batas nasional, memberi beberapa bahasa status bahasa mayoritas dan yang lain bahasa minoritas berdasarkan keadaan nasional tertentu. Sebagai contoh, bahasa Mandarin, satu dari bahasa dunia yang paling banyak digunakan yakni oleh hampir 900 juta penduduk adalah **bahasa mayoritas** di Cina, tetapi di negara-negara lain di mana penduduknya hanya sebagian berbahasa dan berbudaya Cina, status bahasa itu adalah **bahasa minoritas** dihadapkan dengan bahasa-bahasa nasional atau mayoritas lain di negara-negara itu. Sama dengan hal itu, suatu bahasa minoritas di suatu negara besar mungkin dipandang sebagai suatu bahasa mayoritas di suatu negara kecil. Tetapi, hampir semua bahasa dunia, termasuk bahasa-bahasa isyarat untuk mereka yang tuli dan *braille* untuk yang buta, termasuk bahasa minoritas di setiap keadaan nasional. Namun demikian, istilah 'minoritas' sering bersifat berarti-dua (ambigu) dan mungkin ditafsirkan berbeda dalam keadaan yang berbeda, karena mungkin bermatra atau berdimensi angka dan sosial atau politik. Dalam beberapa kasus, hal tersebut mungkin digunakan secara sederhana sebagai suatu ungkapan pelembut bagi kelompok-kelompok non-elite atau bawahan, apakah mereka merupakan suatu mayoritas atau minoritas dalam jumlah dihubungkan dengan beberapa kelompok lain yang dominan secara politik dan sosial.

Bahasa resmi dan nasional

Biarpun terdapat lebih dari 20 Negara yang memiliki lebih dari satu bahasa resmi (India, umpamanya, mempunyai 19 bahasa resmi, sedangkan Afrika Selatan 11), mayoritas negara di dunia ini adalah negara-bangsa monobahasa dalam pengertian mengakui, baik *de jure* maupun *de facto*, hanya satu bahasa resmi untuk tujuan-tujuan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidaklah berarti, bahwa mereka bukanlah masyarakat dwibahasa atau multibahasa, akan tetapi biarpun terdapat banyak bahasa yang secara luas digunakan di suatu negara, hal ini tidaklah

berarti bahwa bahasa-bahasa itu mempunyai wewenang hukum dari bahasa resmi. Di banyak negara yang dulu dijajah, tampak suatu kecenderungan, bahwa bahasa resmi adalah bahasa mantan penjajah. Di samping bahasa resmi, beberapa negara mengakui bahasa-bahasa nasional yang mungkin juga diwajibkan di lembaga-lembaga pendidikan. Pilihan bahasa dalam sistem pendidikan memberi suatu kekuasaan dan gengsi melalui penggunaannya di dalam pendidikan sekolah (formal). Bukan hanya terdapat di sana suatu aspek perlambang, merujuk pada status dan visibilitas, tetapi juga suatu aspek pengertian yang merujuk pada nilai-nilai bersama dan pandangan dunia yang diungkapkan melalui dan di dalam bahasa itu.

Bahasa pengantar/ pengajaran

Bahasa pengantar/pengajaran di sekolah atau lembaga pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) merujuk pada bahasa yang digunakan untuk pengajaran kurikulum dasar dalam sistem pendidikan. Pilihan bahasa atau mungkin bahasa-bahasa (kebijakan pendidikan mungkin merekomendasikan penggunaan beberapa bahasa pengantar) merupakan suatu tantangan yang berulang dalam perkembangan pendidikan yang berkualitas. Walaupun beberapa negara memilih satu bahasa pengantar, sering dalam hal ini bahasa resmi atau bahasa mayoritas, akan tetapi negara-negara lain telah memilih penggunaan strategi-strategi pendidikan yang memberi bahasa nasional atau daerah (lokal) suatu tempat penting dalam persekolahan. Para penutur bahasa ibu yang tidak sama dengan bahasa nasional atau daerah sering mengalami kerugian besar di dalam sistem pendidikan sama dengan kerugian yang diperoleh melalui pengajaran dalam bahasa asing yang merupakan bahasa resmi.

Pengajaran bahasa ibu

Pengajaran **bahasa ibu** pada umumnya merujuk pada penggunaan bahasa ibu peserta didik sebagai bahasa pengantar. Di samping itu, hal tersebut dapat merujuk pada bahasa ibu sebagai mata pelajaran. Hal itu dianggap suatu komponen penting dari pendidikan berkualitas, khususnya di tahun-tahun permulaan. Pandangan pakar adalah bahwa pengajaran bahasa ibu hendaklah meliputi, baik pengajaran tentang maupun pengajaran *melalui* bahasa ini.

Istilah 'bahasa ibu', walaupun digunakan secara luas, dapat merujuk pada berbagai suasana yang berbeda. Definisi sering meliputi unsur-unsur berikut: bahasa yang pertama-tama dipelajari seseorang; bahasa yang dikenali dengan atau dikenal sebagai penutur asli bahasa itu oleh orang-orang lain; bahasa yang diketahui terbaik oleh seseorang dan bahasa yang paling banyak digunakan. 'Bahasa ibu' dapat juga

merujuk pada bahasa 'utama' atau 'bahasa pertama'. Istilah 'bahasa ibu' sering digunakan dalam pernyataan kebijakan dan dalam wacana tentang isu-isu pendidikan. Untuk alasan itulah, maka hal tersebut dipertahankan di dalam dokumen ini, walaupun perlu dicatat bahwa penggunaan istilah 'bahasa ibu' sering gagal membedakan antara semua varian bahasa yang digunakan oleh penutur asli, mulai dari bermacam daerah pedalaman sampai ke bahasa standard berbasis perkotaan yang digunakan sebagai bahasa ibu sekolah. Pengalaman tangan pertama anak terdini dalam logat asli juga tidaklah perlu sesuai dengan versi sekolah formal tentang apa yang disebut bahasa ibu.

Merupakan suatu kebenaran yang nyata namun belum diakui secara umum, bahwa pembelajaran dalam suatu bahasa yang bukan milik sendiri mengajukan tantangan ganda, bukan hanya tantangan dalam mempelajari suatu bahasa baru tetapi juga mempelajari pengetahuan baru yang dikandung oleh bahasa itu. Tantangan-tantangan ini selanjutnya dapat diperburuk dalam hal kelompok-kelompok tertentu sudah berada di dalam suasana risiko atau stres pendidikan, seperti keniraksaraan, minoritas dan pengungsi. Pertimbangan gender melintas dan memotong suasana risiko pendidikan ini, karena para gadis dan wanita mungkin berada dalam kedudukan yang benar-benar tidak menguntungkan. Di hampir semua masyarakat tradisional, para gadis dan wanitalah yang cenderung monobahasa, karena kurang terbuka, baik melalui persekolahan, pekerjaan dengan upah, atau migrasi terhadap bahasa nasional dibandingkan dengan anak-anak, kakak-adik maupun suami mereka.

Studi-studi telah menunjukkan, bahwa dalam banyak hal, pengajaran dalam bahasa ibu menguntungkan pada kompetensi bahasa dalam bahasa pertama, prestasi dalam bidang mata pelajaran lain, dan pembelajaran bahasa ke dua.³ Namun demikian, penerapan prinsip **pengajaran bahasa ibu** masih jauh daripada menjadi peraturan. Beberapa kesulitan yang dihadapi dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengajaran mungkin termasuk hal-hal berikut:

- kadang-kadang bahasa ibu adalah bahasa yang tidak tertulis;
- kadang-kadang bahasa itu tidak diakui secara umum merupakan bahasa yang sah;
- terminologi yang tepat untuk maksud-maksud pendidikan mungkin masih harus dikembangkan;
- mungkin terdapat kekurangan bahan pendidikan dalam bahasa itu;
- keserbaragaman bahasa mungkin memperburuk kesulitan untuk menyediakan persekolahan dalam setiap bahasa ibu;
- mungkin terdapat kekurangan akan guru-guru terlatih yang layak;
- mungkin terdapat perlawanan pada pembelajaran dalam bahasa ibu oleh murid-murid, para orangtua dan guru.

Hak-hak bahasa

Bahasa bukanlah hanya suatu alat untuk komunikasi dan pengetahuan tetapi juga suatu sifat fundamental dari identitas dan pemberdayaan budaya, baik untuk orang-orang maupun kelompok. Oleh karena itu, maka penghormatan atas bahasa orang-orang yang termasuk dalam komunitas bahasa yang berbeda-beda penting untuk hidup bersama yang rukun dan damai. Hal ini berlaku, baik terhadap kelompok-kelompok mayoritas, minoritas (apakah penduduk tradisional suatu negara atau migran baru) maupun terhadap penduduk asli atau pribumi.

Tuntutan untuk bahasa merupakan hak-hak pertama yang diajukan oleh kaum minoritas pada waktu terjadi perubahan dan evolusi politik. Tuntutan hak-hak untuk bahasa seperti itu mulai dari status resmi dan hukum bahasa minoritas dan pribumi sampai pada bahasa yang diajarkan dan digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain, demikian pula di dalam media. Mengenai pendidikan, hak-hak bahasa yang sudah disusun dalam persetujuan internasional⁴ untuk kelompok-kelompok minoritas dan pribumi meliputi hal-hal berikut:

- persekolahan dalam bahasa mereka, jika diinginkan demikian;
- akses pada bahasa komunitas yang lebih besar dan pada sistem pendidikan nasional;
- pendidikan antarbudaya yang mempromosikan sikap positif bahasa minoritas dan pribumi serta kebudayaan yang mereka nyatakan;
- akses pada bahasa-bahasa internasional.

Hak-hak pendidikan yang sudah dirumuskan di dalam persetujuan-persetujuan internasional bagi pekerja-pekerja migran dan anggota keluarga mereka⁵ menyatakan:

- bahwa integrasi anak-anak mereka hendaklah diberi kemudahan dengan mengajarkan bahasa yang digunakan dalam sistem persekolahan;
- bahwa kesempatan hendaklah diciptakan untuk mengajarkan kepada anak-anak bahasa dan kebudayaan mereka.

Pengajaran bahasa

Bahasa pengantar/pengajaran di sekolah adalah alat komunikasi untuk pengetahuan. Ini berbeda dengan **pengajaran bahasa** itu sendiri di mana tata bahasa, kosa kata, dan bentuk-bentuk tulisan dan lisan bahasa merupakan suatu kurikulum khusus untuk kemahiran bahasa ke dua selain bahasa ibu. Mempelajari bahasa lain membuka kesempatan atau akses pada sistem-sistem nilai dan cara-cara lain dalam menafsirkan dunia, mendorong pemahaman antarbudaya dan membantu mengurangi xenophobia (ketaksukaan pada yang serba asing). Hal ini berlaku sama terhadap penutur bahasa minoritas dan mayoritas.

Cara bahasa-bahasa diajarkan berubah terus-menerus, dan mungkin sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain atau malah di dalam negara yang sama. Hal ini tergantung banyak pada pengertian bahasa yang berlaku dan paradigma pengajaran bahasa, demikian pula pada peranan yang ditugaskan pada bahasa yang diajarkan itu.

Pendidikan dwibahasa dan multibahasa

Pendidikan dwibahasa dan multibahasa merujuk pada penggunaan dua atau lebih bahasa sebagai bahasa pengantar. Di banyak kepustakaan khusus, ke dua jenis ini digolongkan di bawah istilah pendidikan dwibahasa. Akan tetapi, UNESCO menerima istilah 'pendidikan multibahasa' di tahun 1999 dalam Resolusi 12 Konferensi Umum yang merujuk pada penggunaan sedikitnya tiga buah bahasa, bahasa ibu, bahasa regional atau nasional dan bahasa internasional dalam pendidikan.⁶ Resolusi itu mendukung pandangan bahwa persyaratan peranserta global dan nasional, dan kebutuhan khusus komunitas budaya dan bahasa tertentu hanya dapat dialamatkan oleh pendidikan multibahasa. Di daerah-daerah di mana bahasa peserta didik bukanlah bahasa resmi atau nasional negara itu, maka pendidikan dwibahasa dan multibahasa memungkinkan pengajaran bahasa ibu sambil serentak memungkinkan kemahiran bahasa-bahasa yang digunakan di daerah-daerah yang lebih luas dari suatu negara dan dunia. Pendekatan tambahan pada kedwibahasaan ini berbeda dengan apa yang disebut kedwibahasaan subtraktif yang bermaksud memindahkan anak-anak ke bahasa ke dua sebagai bahasa pengajaran. Bukan hanya terdapat di sana suatu aspek perlambang, merujuk pada status dan visibilitas, tetapi juga suatu aspek pengertian yang merujuk pada nilai-nilai bersama dan pandangan dunia yang diungkapkan melalui dan di dalam bahasa itu.

Kerano
normati
untuk b
bahasa
pendidi

Jika
f
ahasa-
dan
kan

Status dan peranan bahasa-bahasa secara internasional sudah menjadi pokok beragam deklarasi, rekomendasi dan persetujuan. Terdapat beberapa yang secara khusus relevan dengan diskusi tentang bahasa dan pendidikan. Kita mulai dengan menempatkan diskusi tentang bahasa di dalam kerangka persetujuan dan instrumen penentuan standard Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diteruskan dengan lebih banyak rujukan pada mandat misi UNESCO di tingkat internasional. Kemudian, Deklarasi dan Rekomendasi yang berasal dari konperensi-konperensi non-pemerintah dipertimbangkan. Untuk maksud-maksud naskah sikap ini, maka hanya persetujuan yang bersifat internasional yang dipertimbangkan.⁷

Maksud penyajian kerangka dengan cara ini adalah untuk menjelaskan persetujuan internasional yang luas mengenai isu bahasa dan pentingnya hal itu dalam sistem pendidikan, sebelum berpindah pada penyajian Bagian III, Pedoman UNESCO tentang Bahasa dan Pendidikan.

A. Instrumen penentuan standard PBB

Satu dari instrumen penentuan standard yang fundamental sifatnya adalah **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia** yang diproklamasikan di tahun 1948 meletakkan prinsip dasar melawan diskriminasi berdasarkan bahasa: 'Pasal 2: Setiap orang berhak untuk semua hak dan kebebasan yang dicantumkan di dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan jenis apa pun, seperti . . . bahasa'.

Hak-hak orang yang tergolong minoritas selanjutnya ditentukan oleh **Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik** tahun 1966 dan **Deklarasi tentang Hak-hak Orang tergolong Minoritas Nasional atau Etnik, Religius dan Bahasa** tahun 1992. Bila Pasal 27 dari Perjanjian Internasional lebih merujuk secara umum pada hak orang tergolong minoritas 'untuk menggunakan bahasa mereka sendiri . . . dalam komunitas dengan anggota-anggota kelompok mereka yang lain', maka Deklarasi secara eksplisit mengemukakan relevansi pada isu bahasa dalam bidang pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, bahwa orang-orang yang tergolong minoritas hendaklah memperoleh kesempatan yang memadai 'untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau mendapat pengajaran dalam bahasa ibu mereka' dan bahwa langkah-langkah harus diambil 'guna mendorong pengetahuan tentang . . . bahasa dan budaya minoritas'.

Hak-hak pendidikan penduduk pribumi dialamatkan oleh *the International Labour Organization* (ILO – Organisasi Perburuhan Internasional) di tahun 1989 melalui **Konvensi 169 tentang Penduduk Pribumi dan Sukubangsa di Negara-negara Merdeka**. Pasal 28 mewajibkan bahwa ‘anak-anak penduduk ini hendaklah, jika mungkin, diajar membaca dan menulis dalam bahasa pribumi sendiri atau dalam bahasa yang paling biasa digunakan oleh kelompok mereka itu’ dan bahwa ‘langkah-langkah yang memadai hendaklah diambil untuk menjamin bahwa penduduk ini mempunyai kesempatan untuk meraih kemahiran dalam bahasa nasional atau dalam salah satu bahasa resmi negara itu’. Pasal itu serentak mengemukakan bahwa ‘langkah-langkah hendaklah diambil untuk melestarikan dan mempromosikan pembangunan dan praktik bahasa-bahasa pribumi penduduk yang bersangkutan’.

Sejauh mengenai penduduk yang non-nasional, **Deklarasi 1985 tentang Hak Asasi Manusia Perorangan yang tidak termasuk Bangsa yang tinggal di suatu Negara** menjelaskan di dalam Pasal 5 bahwa ‘Orang asing hendaklah menikmati . . . hak untuk menggunakan bahasa, budaya dan tradisi mereka sendiri.’ **Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya** mengemukakan bahwa ‘Negara-negara yang memberi pekerjaan hendaklah mengikuti suatu kebijakan . . . bertujuan untuk memberi kemudahan dalam mengintegrasikan anak-anak pekerja migran ke dalam sistem persekolahan setempat, khususnya tentang pengajaran mereka di dalam bahasa lokal’ dan ‘pengajaran bahasa ibu dan kebudayaan mereka’; selanjutnya bagi mereka mungkin ‘disediakan rencana pendidikan khusus dalam bahasa ibu anak-anak pekerja migran’ (Pasal 45).

Konvensi tentang Hak-hak Anak tahun 1989 menunjuk pada satu aspek lain dari isu bahasa dalam pendidikan. Ditekankannya bahwa bahasa juga harus dipertimbangkan sebagai suatu nilai pendidikan. Pasal 29 menegaskan bahwa ‘pendidikan anak hendaklah diarahkan pada . . . pembangunan rasa hormat terhadap identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai . . . anak-anak’.

B. Deklarasi dan konvensi UNESCO

Mandat UNESCO menugaskannya berurusan dengan isu-isu bahasa. Dalam pengertian ini, Pasal 1 dari **Konstitusi UNESCO** menegaskan prinsip fundamental bahwa bahasa tidak boleh menyebabkan diskriminasi jenis apapun: ‘hak asasi manusia dan kebebasan fundamental . . . ditegaskan untuk penduduk dunia, tanpa perbedaan ras, kelamin, bahasa atau agama’.

Secara khusus terkait dengan pendidikan, **Konvensi melawan Diskriminasi terhadap Pendidikan** tahun 1960 menetapkan hak-hak pendidikan orang-orang yang tergolong minoritas. Pasal 5 mempunyai relevansi khusus pada isu bahasa pada waktu membataskan peranan masing-masing bahasa ibu dan bahasa mayoritas: ‘anggota-

anggota minoritas nasional (mempunyai hak) untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mereka sendiri, termasuk . . . penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri, dengan syarat . . . bahwa hak ini tidak dilaksanakan dalam cara yang menghindarkan anggota-anggota minoritas ini dari pemahaman kebudayaan dan bahasa komunitas sebagai keseluruhan dan dari peransertanya di dalam kegiatan-kegiatan itu.

Rekomendasi tentang Pembangunan Pendidikan Orang Dewasa tahun 1976 menguatkan peranan bahasa ibu karena secara eksplisit merekomendasikan pengajaran bahasa ibu dan diterimanya suatu perspektif yang lebih luas tentang pembelajaran bahasa: 'Pasal 22: Mengenai minoritas etnik, kegiatan-kegiatan pendidikan orang dewasa hendaklah memungkinkan mereka untuk . . . mendidik mereka sendiri dan anak-anaknya dalam bahasa ibu mereka, mengembangkan kebudayaan mereka sendiri dan mempelajari bahasa-bahasa selain daripada bahasa ibunya.'

Peranan bahasa ibu dalam pendidikan juga dirujuk di dalam **Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Ras** tahun 1978 yang merekomendasikan di Pasal 9 bahwa 'langkah-langkah hendaklah diambil yang membuat mungkin bagi anak-anak (dari kelompok penduduk yang berasal dari luar negeri/orang asing) untuk diajar bahasa ibu mereka.'

Deklarasi dan Kerangka Terpadu untuk Tindakan tentang Pendidikan untuk Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi mempromosikan pembelajaran bahasa asing (Pasal 19) dan 'penghormatan pada hak-hak pendidikan dari orang-orang yang tergolong . . . minoritas, demikian pula penduduk pribumi' sehingga berkembang pemahaman antara komunitas-komunitas dan bangsa-bangsa (Pasal 29).

Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya yang diterima dan disahkan di tahun 2001 juga menyinggung pentingnya bahasa-bahasa untuk mempromosikan keberagaman budaya. Pasal 6 dari Rencana Aksi untuk pelaksanaan Deklarasi membataskan peranan yang harus dimainkan bahasa di bidang pendidikan, termasuk penghormatan terhadap bahasa ibu, keberagaman bahasa di semua tingkat pendidikan dan promosi multibudaya sejak usia dini.

C. Hasil konperensi-konperensi internasional

Banyak konperensi tingkat tinggi (KTT) dunia yang diselenggarakan di tahun-tahun belakangan ini dengan bantuan PBB dan mengikuti jalan pemikiran antarpemerintah telah mencatat sangat pentingnya bahasa-bahasa itu. Sebagai contoh, **Deklarasi dan Program Aksi Beijing** yang diterima dan disahkan di tahun 1995 di Konperensi ke Empat Dunia tentang Perempuan menegaskan prinsip akses yang sama untuk pendidikan yang harus diraih melalui penghapusan 'diskriminasi dalam pendidikan di semua tingkat berdasarkan . . . bahasa'.

Pengajaran bahasa ibu tampaknya menjadi suatu isu yang berulang. **Deklarasi dan Kerangka Aksi Delhi** yang diterima dan disahkan di tahun 1993 pada KTT Pendidikan Untuk Semua (PUS) mengambil pendirian yang tegas tentang isu pengajaran bahasa ibu dengan mendukung pendidikan yang 'diawali dengan pengajaran bahasa ibu, biarpun dalam beberapa hal sesudah itu para peserta didik memerlukan penguasaan suatu bahasa nasional atau bahasa yang penggunaannya secara luas agar mereka dapat berperanserta secara efektif di dalam masyarakat yang lebih luas di mana mereka bermukim'. Kebutuhan untuk mengakui 'peranan penting bahasa ibu untuk pengajaran permulaan' juga dirumuskan di dalam **Penegasan Amman** di tahun 1996, pengumuman resmi pada akhir Pertemuan Pertengahan Dasawarsa dari Forum Konsultatif Internasional tentang Pendidikan Untuk Semua.

Deklarasi Hamburg tentang Pembelajaran Orang Dewasa di tahun 1997 yang diterima dan disahkan pada Konperensi Internasional ke Lima tentang Pendidikan Orang Dewasa menyatakan pentingnya isu kelompok minoritas dan penduduk pribumi serta mengusulkan agar 'hak belajar dalam bahasa ibu hendaklah dihormati dan dilaksanakan' (Pasal 15). **Deklarasi dan Program Aksi Wina** yang diterima dan disahkan oleh Konperensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (1993) secara lebih umum menyatakan dalam seksi I, paragraf 19, bahwa 'orang-orang yang tergolong minoritas mempunyai hak untuk . . . menggunakan bahasa mereka sendiri di lingkungan sendiri maupun di tempat umum secara bebas dan tanpa gangguan atau bentuk diskriminasi apa pun'.

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Tinggi untuk Abad XXI: Visi dan Aksi di tahun 1998 mengemukakan pentingnya multibahasa di pendidikan tinggi: dalam rangka mendorong pengertian antarbangsa, 'praktik multibahasa, program-program pertukaran dosen dan mahasiswa . . . hendaklah menjadi bagian integral dari semua sistem pendidikan tinggi' (Pasal 15).

Dalam bidang bahasa dan pendidikan, laporan dan rekomendasi **Konperensi Internasional tentang Pendidikan** baru-baru ini menekankan pentingnya:

- pengajaran bahasa ibu pada permulaan pendidikan formal (sekolah) untuk pertimbangan pedagogis, sosial dan budaya;⁸
- pendidikan multibahasa dengan maksud untuk memelihara identitas budaya dan mempromosi mobilitas dan dialog;⁹
- belajar bahasa asing sebagai bagian dari pendidikan antarbudaya yang bertujuan untuk mempromosi pengertian antarkomunitas dan antara bangsa-bangsa.¹⁰

Pedoman
UNESCO
untuk b
dan
pendidi

an
CO
ahasa

kan

Terdapat prinsip-prinsip pedoman dasar tertentu yang sama untuk semua dokumen, persetujuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama dan sepanjang tahun-tahun mandat UNESCO untuk tindakan atau aksi di bidang ini. Hal-hal ini mengarahkan kita untuk menghasilkan seperangkat pedoman yang mewakili pendekatan organisasi sekarang ini terhadap bahasa dan pendidikan di abad ke dua puluh satu, dan yang akan berfungsi untuk menyatakan sikap komunitas internasional di berbagai negara anggotanya. Pedoman ini seluruhnya didasarkan pada suatu tinjauan tentang deklarasi dan rekomendasi sebelumnya, dan mewakili keberagaman pemikiran tentang isu yang rumit dan menantang ini.

Semuanya dibagi ke dalam tiga prinsip dasar:

1. UNESCO mendukung pengajaran bahasa ibu sebagai alat untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan jalan membangun di atas pengetahuan dan pengalaman para peserta didik dan guru.
2. UNESCO mendukung pendidikan dwibahasa dan/atau multibahasa di semua tingkat pendidikan sebagai suatu alat untuk mempromosi, baik persamaan sosial maupun gender dan sebagai suatu unsur kunci dari masyarakat beragam bahasa.
3. UNESCO mendukung bahasa sebagai suatu komponen penting dari pendidikan antarbudaya dalam rangka mendorong pengertian antara kelompok penduduk yang berbeda dan menjamin rasa hormat terhadap hak-hak fundamental.

Suatu seri orientasi yang lebih khusus diuraikan di bawah ini yang sesuai dengan setiap prinsip dasar tersebut.

Prinsip 1

UNESCO mendukung pengajaran bahasa ibu¹¹ sebagai suatu alat untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan jalan membangun di atas pengetahuan dan pengalaman para peserta didik dan guru.

[I] Pengajaran bahasa ibu penting untuk pengajaran awal¹² dan keaksaraan¹³ dan hendaklah 'diperpanjang sejauh mungkin sampai tingkat tertentu dalam pendidikan':¹⁴

- 'setiap murid hendaklah memulai pendidikan sekolahnya (formal) dalam bahasa ibunya';¹⁵
- 'orang dewasa yang butahuruf hendaklah memulai langkah pertama ke keaksaraan melalui bahasa ibu mereka, dilanjutkan dengan bahasa ke dua jika mereka menginginkannya dan mampu';¹⁶
- jika tempat tertentu mempunyai beragam bahasa, maka cara dan alat hendaklah dicari untuk 'mengatur kelompok-kelompok pengajaran dengan bahasa ibu';¹⁷
- 'jika pencampuran kelompok-kelompok tidak terhindarkan, maka pengajaran hendaklah dalam bahasa yang memberi paling sedikit kesukaran kepada bagian terbesar murid, dan bantuan khusus hendaklah diberikan kepada mereka yang tidak menggunakan bahasa pengantar itu'.¹⁸

[II] 'Keaksaraan hanya dapat terpelihara jika tersedia bahan bacaan yang memadai jumlahnya bagi para remaja dan orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak sekolah, dan untuk hiburan, demikian pula untuk pelajaran':¹⁹

- Produksi dan distribusi bahan pengajaran dan sumberdaya belajar serta bahan bacaan lain di dalam bahasa ibu hendaklah dipromosikan.²⁰

[III] Mengenai pelatihan guru dan pengajaran bahasa ibu: 'Semua perencanaan pendidikan hendaklah meliputi, pada setiap tingkat, penyediaan dini untuk pelatihan, dan pelatihan lanjutan, sejumlah guru yang kompeten dan berijazah dari negara yang bersangkutan yang tahu tentang kehidupan rakyatnya dan mampu mengajar di dalam bahasa ibu.'²¹

Prinsip 2

UNESCO mendukung *pendidikan dwibahasa* dan/atau *multibahasa* di semua tingkat pendidikan²² sebagai suatu alat promosi, baik untuk persamaan sosial maupun gender dan suatu unsur kunci bagi masyarakat beragam bahasa.

[I] 'Komunikasi, ungkapan dan kemampuan mendengar dan dialog [hendaklah didorong], pertama-tama di dalam bahasa ibu, kemudian, [jika bahasa ibu berbeda dengan bahasa resmi atau nasional] dalam bahasa resmi [atau nasional] di negara itu, demikian pula di dalam satu atau lebih bahasa asing'²³ melalui:

- 'kemahiran dini . . . tentang bahasa ke dua di samping bahasa ibu';²⁴
- pengenalan 'bahasa ke dua . . . sebagai suatu mata pelajaran'²⁵ yang jumlahnya 'hendaklah ditingkatkan berangsur-angsur'²⁶ dan hendaklah tidak dijadikan bahasa pengantar 'sampai murid-murid cukup mengetahuinya'.²⁷
- 'pendidikan lanjutan di dalam bahasa ke dua di tingkat sekolah dasar berdasarkan penggunaannya sebagai bahasa pengantar, jadi menggunakan dua buah bahasa untuk memperoleh pengetahuan sepanjang persekolahan sampai ke tingkat universitas;
- mempelajari secara intensif dan transdisipliner sedikitnya sebuah bahasa . . . ke tiga di sekolah menengah, sehingga sewaktu para siswa meninggalkan sekolah, mereka sudah mempunyai pengetahuan yang memadai dalam tiga bahasa – yang sudah mewakili rentang keterampilan bahasa praktis yang normal di abad ke dua puluh satu'.²⁸

[II] 'Pertukaran internasional para guru sekolah dasar dan menengah [hendaklah dipromosikan] untuk mengajarkan mata pelajaran keahliannya di sekolah-sekolah di negara-negara lain dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dan dengan demikian memungkinkan murid-murid mereka memperoleh baik pengetahuan maupun keterampilan bahasa'.²⁹

[III] Tekanan hendaklah diberikan pada perumusan 'kebijakan nasional yang kuat yang dirancang untuk mempromosikan . . . pengajaran bahasa dalam ruangmaya [dan penguatan dan perluasan dari] dukungan dan bantuan internasional untuk negara-negara berkembang guna memudahkan pembangunan bahan-bahan tentang pendidikan bahasa yang dengan mudah dan bebas dalam bentuk elektronik dan guna peningkatan keterampilan modal insani di bidang ini'.³⁰

Prinsip 3

UNESCO mendukung bahasa sebagai suatu komponen penting dari pendidikan antarbudaya dalam rangka mendorong pengertian antara kelompok-kelompok penduduk dan menjamin rasa hormat pada hak-hak fundamental.

[I] Langkah-langkah hendaklah diambil 'untuk menghapuskan diskriminasi pendidikan di semua tingkat berdasarkan gender, ras, bahasa, agama, asal nasional, umur atau ketidakmampuan atau bentuk lain dari diskriminasi apa pun'.³¹

[II] 'Hak-hak pendidikan orang-orang yang tergolong . . . minoritas, demikian pula penduduk pribumi'³² hendaklah dihormati sepenuhnya, melalui:

- pelaksanaan 'hak belajar dalam bahasa ibu'³³ dan 'penggunaan penuh metode pengajaran yang layak budaya di dalam mengkomunikasikan dan menyebarkan pengetahuan';³⁴
- pengajaran tentang dan melalui, bukan hanya bahasa ibu, tetapi juga bahasa-bahasa nasional atau resmi, demikian pula bahasa-bahasa komunikasi global, sehingga penduduk minoritas dan asli mempunyai kesempatan untuk berperanserta di dalam dan memberi iuran pada komunitas yang lebih besar.³⁵

[III] Pendidikan hendaklah menaikkan 'kesadaran akan nilai positif keberagaman budaya [dan bahasa]',³⁶ dan untuk maksud ini:

- 'kurikulum [hendaklah diperbaiki] untuk mempromosi dimasukkannya secara realistis dan positif informasi tentang sejarah, budaya, bahasa dan identitas minoritas [atau asli]'.³⁷
- komponen budaya pengajaran dan pembelajaran bahasa hendaklah diperkuat untuk dapat meraih pengertian yang lebih mendalam tentang kebudayaan lain;³⁸
- 'bahasa-bahasa hendaklah bukan hanya pelatihan bahasa sederhana, tetapi kesempatan untuk menggambarkan tentang cara-cara hidup lain, literatur lain, adat-istiadat lain'.³⁹

Notes

1. Bandingkan dengan Wurm, S. (Ed.) (2001): **Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing**, Paris, UNESCO Publishing. (*Atlas Bahasa-bahasa Dunia yang dalam Bahaya untuk Hilang*).
2. Bandingkan dengan Grimes, B. (Ed.): **Ethnologue: Languages of the World**, 14th Edition, Dallas Texas, SIL International. (*Etnologi: Bahasa-bahasa Dunia*).
3. Bandingkan dengan penemuan-penemuan tinjauan penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh Bank Dunia: Dutcher, N. bekerjasama dengan Tucker, G.R. (1997). **The Use of First and Second Languages in Education: A Review of Educational Experience**, Washington, D.C., World Bank, Country Department III (*Penggunaan Bahasa Pertama dan ke Dua dalam Pendidikan: suatu Tinjauan Pengalaman Pendidikan*): Kesimpulan yang terpenting dari penelitian dan pengalaman yang ditinjau di dalam makalah ini adalah bahwa jika belajar adalah tujuan, termasuk mempelajari bahasa ke dua, bahasa pertama anak (yakni bahasa ibunya) hendaklah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahun-tahun permulaan persekolahan. . . . Bahasa pertama penting untuk pengajaran membaca permulaan, dan untuk pemahaman mata pelajaran. Hal itu merupakan fundasi yang perlu untuk perkembangan kognitif di atas mana didasarkan kemahiran bahasa ke dua; Bandingkan juga dengan Mehrotra, S. (1998). **Education for All: Policy Lessons From High-Achieving Countries: UNICEF Staff Working Papers**, New York: Unicef (*Pendidikan Untuk Semua: Pelajaran Kebijakan dari Negara-negara Berprestasi Tinggi: Makalah-makalah Kerja Anggota Staf UNICEF*): 'Dalam suasana di mana orangtua butuhuruf . . . , jika bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa yang tidak digunakan di rumah, maka masalah-masalah belajar dalam lingkungan yang bercirikan kemiskinan bertambah, dan sesuai dengan itu, kemungkinan untuk putus sekolah meningkat. Dalam keadaan ini, pengalaman berprestasi tinggi tidak diragukan: bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar/pengajaran di tingkat sekolah dasar dalam semua hal. . . . Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa murid-murid belajar membaca lebih cepat jika diajarkan dalam bahasa ibu mereka. Ke dua, murid-murid yang telah mempelajari membaca dalam bahasa ibu mereka, mempelajari bahasa ke dua lebih cepat daripada mereka yang pertama diajar membaca dalam bahasa ke dua. Ke tiga, juga dalam keterampilan belajar akademik, murid-murid yang diajarkan membaca dalam bahasa ibu memperoleh keterampilan itu lebih cepat'; bandingkan juga dengan Dutcher, N. **Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies**, Center for Applied Linguistics, Washington, D.C. (2001). (*Meluaskan Kesempatan Pendidikan dalam Masyarakat Beragam Bahasa*).
4. Bandingkan dengan **Hamburg Declaration on Adult Learning**, UNESCO (1997) (*Deklarasi Hamburg tentang Pembelajaran Orang Dewasa*); **The Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities** (1992) (*Deklarasi tentang Hak-hak Orang untuk termasuk dalam Minoritas Nasional atau Etnik, Religius dan Bahasa*); **Convention and Recommendation against Discrimination in Education** (1960) (*Konvensi dan Rekomendasi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan*); 18 C/Resolution (Resolusi) 1.41: **Co-operation with international non-governmental organizations active in the field of education** (1974) (*Kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang aktif dalam pendidikan*); bandingkan juga dengan Bab III: Pedoman UNESCO tentang Bahasa dan Pendidikan, Prinsip III.
5. Bandingkan dengan **International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families** (1990) (*Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka*).
6. 30 C/Resolution (Resolusi) 12: **Implementation of a Language Policy for the World Based on Multilingualism** (1999), UNESCO. (*Pelaksanaan suatu Kebijakan Bahasa untuk Dunia Berbasis Multibahasa*).
7. Di samping itu, terdapat banyak persetujuan dan deklarasi regional yang membuat rujukan pada bahasa-bahasa dan pendidikan {bandingkan, **the Durban Statement of Commitment** (*Pernyataan Komitmen Durban*), Konperensi ke 7 Menteri-menteri Pendidikan Negara-negara Anggota Afrika 1998; **Harare Declaration** (*Deklarasi Harare*), Konperensi Menteri-menteri Antarpemerintah tentang Kebijakan Bahasa di Afrika 1997; Laporan Akhir Konperensi ke 7 Menteri-menteri Pendidikan Amerika Latin dan Karibia, Kingston, 1996}.
8. Bandingkan dengan **International Conference on Education 46th Session 2001** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 46 tahun 2001*), Laporan Akhir, halaman 11: 'Sudah semakin jelas bahwa bahasa pengantar pada permulaan pendidikan seseorang, merupakan momen yang penting sekali untuk proses pembelajaran lanjutan, dan itu hendaklah bahasa ibu.'
9. Bandingkan dengan **International Conference on Education 46th Session 2001** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 46 tahun 2001*), Laporan Akhir, halaman 17: Isi pendidikan perlu menggambarkan 'semakin pentingnya komunikasi, pengungkapan dan kemampuan untuk mendengar dan dialog, pertama-tama dalam bahasa ibu, kemudian dalam bahasa resmi di suatu negara, demikian pula dalam satu atau lebih bahasa asing'; **International Conference on Education 43rd Session 1992** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 43 tahun 1992*), Laporan Akhir, halaman 20: 'Pada waktu memilih bahasa pengantar, khususnya di tingkat pendidikan dasar, perhitungan hendaklah diadakan, baik pada efisiensi proses pendidikan maupun hak orang-seorang dan berbagai kelompok etnik untuk memelihara identitas budaya di mana bahasa mereka merupakan satu dari sarana yang sangat penting'.
10. Bandingkan dengan **International Conference on Education 46th Session 2001** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 46 tahun 2001*), Laporan Akhir, halaman 11: 'Belajar bahasa adalah unsur kunci untuk hidup bersama'; **International Conference on Education 44th Session 1994** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 44 tahun 1994*), , halaman 26: 'Belajar bahasa asing menawarkan suatu alat untuk mencapai pengertian yang lebih dalam tentang kebudayaan orang lain yang dapat melayani sebagai dasar untuk pembangunan pengertian yang lebih baik antarkomunitas dan antara bangsa-bangsa'.

11. Bandingkan dengan **International Conference on Education 46th Session 2001** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 46 tahun 2001*), Laporan Akhir; **World Education Forum 2000** (*Forum Pendidikan Dunia tahun 2000*), Laporan Akhir; **The Delhi Declaration and Framework for Action, Education for All Summit 1993** (*Deklarasi dan Kerangka Aksi Delhi, KTT Pendidikan Untuk Semua tahun 1993*); **The Use of Vernacular Languages in Education**, Paris, 1953 (*Penggunaan Bahasa-bahasa Daerah dalam Pendidikan*).
12. Bandingkan dengan **Amman Affirmation** (1996) (*Penegasan Amman*): 'peranan penting bahasa ibu untuk pendidikan awal' hendaklah diakui; **The Delhi Declaration and Framework for Action, Education for All Summit 1993** (*Deklarasi dan Kerangka Aksi Delhi, KTT Pendidikan Untuk Semua*): 'Di mana bahasa pengantar lain daripada bahasa ibu peserta didik, maka besar kemungkinan proses belajar awal akan lebih lambat dan prestasi pun lebih lambat. Dengan alasan ini, maka para pendidik sudah lama menganjurkan keuntungan yang ditawarkan, jika mungkin, pengajaran awal dalam bahasa ibu'.
13. Bandingkan dengan **International Conference on Education 42nd Session 1990** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan, Sidang ke 42 tahun 1990*), Laporan Akhir: 'Dalam keadaan multibahasa, maka kebijakan mengenai bahasa keaksaraan hendaklah dirumuskan secara berhati-hati, terutama di mana bahasa nasional atau resmi berbeda dengan bahasa-bahasa lokal. Penggunaan bahasa ibu diinginkan.'
14. **The Use of Vernacular Languages in Education** (*Penggunaan Bahasa-bahasa Daerah dalam Pendidikan*), halaman 35 UNESCO, Paris (1953).
15. Idem, halaman 68.
16. Idem, halaman 69.
17. Idem, halaman 51.
18. Idem, halaman 51.
19. Idem, halaman 69.
20. Bandingkan dengan **International Conference on Education 1992** (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan 1992*): 'penyiapan bahan-bahan pengajaran di dalam bahasa ibu hendaklah didorong'. Laporan Akhir, halaman 21.
21. **Recommendation concerning the Status of Teachers** (*Rekomendasi mengenai Status Guru*) disahkan dan diterima oleh Konperensi Khusus Antarpemerintah tentang Status Guru 1966.
22. 30 C/Resolusi 42: **Towards a culture of peace** (*Ke arah kebudayaan perdamaian*) 1999; bandingkan juga dengan 30 C/Resolusi 12: **Implementation of a Language Policy for the World Based on Multilingualism** (1999), UNESCO (*Pelaksanaan Kebijakan Bahasa untuk Dunia yang Berbasis Multibahasa*).
23. **International Conference on Education 2001, Proposals for Action** [para. 18] (*Konperensi Internasional tentang Pendidikan 2001, Usul untuk Aksi*, para. 18).
24. 30 C/Resolusi 12: **Implementation of a Language Policy for the World Based on Multilingualism** [1999], UNESCO (*Pelaksanaan Kebijakan Bahasa untuk Dunia yang Berbasis Multibahasa*).
25. **The Use of Vernacular Languages in Education**, UNESCO, Paris [1953] (*Penggunaan Bahasa-bahasa Daerah dalam Pendidikan*).
26. Idem, halaman 69.
27. Idem, halaman 69.
28. 30 C/Resolusi 12. **Implementation of a Language Policy for the World Based on Multilingualism** [1999] (*Pelaksanaan Kebijakan Bahasa untuk Dunia yang Berbasis Multibahasa*).
29. 30 C/Resolusi 12. **Implementation of a Language Policy for the World Based on Multilingualism** [1999] (*Pelaksanaan Kebijakan Bahasa untuk Dunia yang Berbasis Multibahasa*).
30. **Draft Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace** (*Buram Rekomendasi mengenai Promosi dan Penggunaan Multibahasa dan Akses Universal pada Ruangmaya*), Paragraf 1 [Catatan: atas permintaan Konperensi Umum tahun 2001 dengan 31 C/Resolusi 33, Buram rekomendasi ini akan diserahkan kepada Dewan Eksekutif pada Sidangnya yang ke 165].
31. **Beijing Declaration and Platform for Action** (1995) (*Deklarasi dan Program Aksi Beijing*); lihat juga: **Convention and Recommendation against Discrimination in Education** (1960) (*Konvensi dan Rekomendasi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan*), Pasal 1: "istilah 'diskriminasi' meliputi setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna, kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lain, asal nasional atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, mempunyai maksud atau efek untuk meniadakan atau merusak kesamaan perlakuan dalam pendidikan'.
32. 28 C/Resolusi 5.4, **Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy** (1995), UNESCO. (*Deklarasi dan Kerangka Aksi Terpadu tentang Pendidikan untuk Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*).

33. **Hamburg Declaration on Adult Learning** (*Deklarasi Hamburg tentang Pembelajaran Orang Dewasa*), Konperensi Internasional ke Lima tentang Pendidikan Orang Dewasa 1997, Pasal 15; **ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries** (1989) (*Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 169 mengenai Penduduk Asli dan Suku bangsa di Negara-negara yang Sudah Merdeka*) menyatakan bahwa 'anak-anak yang tergolong penduduk ini hendaklah, di mana mungkin dilaksanakan, diajar membaca dan menulis di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa yang paling biasa digunakan oleh kelompok mereka' (Pasal 28.1); **Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities** (1992) (*Deklarasi tentang Hak-hak Penduduk yang tergolong Minoritas Nasional atau Etnik, Religius atau Bahasa*) mewajibkan Negara-negara untuk 'mengambil langkah-langkah sehingga, di mana mungkin, orang-orang yang tergolong minoritas memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempelajari bahasa ibunya atau memperoleh pengajaran di dalam bahasa ibu mereka' (Pasal 4.3).
34. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001) (*Deklarasi Universal UNESCO tentang Keberagaman Budaya*), Rencana Aksi, paragraf 8.
35. Bandingkan **Convention and Recommendation against Discrimination in Education** (1960) (*Konvensi dan Rekomendasi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan*), Pasal 5: 'anggota-anggota . . . minoritas [hendaklah tidak dicegah dari] pengertian akan kebudayaan dan bahasa keseluruhan komunitas'; 18 C/Resolusi 1.41: **Co-operation with international non-governmental organizations active in the field of education** (*Kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang aktif di bidang pendidikan*), 1974: UNESCO 'setiap orang berhak untuk mempunyai pengetahuan yang saksama tentang bahasanya sendiri dan pengetahuan yang baik tentang bahasa yang lain, sebaiknya suatu bahasa komunikasi internasional yang memampukannya, bersama dengan dasar-dasar yang diperolehnya dari kebudayaan nasionalnya untuk memperoleh akses penuh pada kebudayaan dunia dan pada pertukaran gagasan-gagasan universal'; **ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries** (1989) (*Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 169 mengenai Penduduk Asli dan Suku bangsa di Negara-negara Merdeka*): 'Langkah-langkah yang memadai hendaklah diambil untuk menjamin bahwa penduduk ini mempunyai kesempatan untuk meraih kemahiran di dalam bahasa nasional atau di salah satu bahasa resmi di negara itu' (Pasal 28.2); **Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development** (1995) (*Keberagaman Kreatif Kita: Laporan Komisi Dunia tentang Kebudayaan dan Pembangunan*). UNESCO: 'Sekolah-sekolah hendaklah mengajarkan beberapa bahasa, secara khusus, baik bahasa lokal (atau minoritas) maupun bahasa mayoritas', halaman 59.
36. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001) (*Deklarasi Universal UNESCO tentang Keberagaman Budaya*), Rencana Aksi, paragraf 7.
37. **Fifth International Conference on Adult Education 1997** (*Konperensi Internasional ke Lima tentang Pendidikan Orang Dewasa*): Laporan Lokakarya: Minoritas dan Pembelajaran Orang Dewasa; bandingkan juga: **The Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities** (1992) (*Deklarasi tentang Hak-hak Orang-orang yang tergolong Minoritas Nasional atau Etnik, Religius dan Bahasa*), Pasal 4.4: 'mengambil langkah-langkah di bidang pendidikan dalam rangka mendorong pengetahuan tentang . . . bahasa dan budaya minoritas'; dan **Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development** (1995) (*Keberagaman Kreatif Kita: Laporan Komisi Dunia tentang Kebudayaan dan Pembangunan*), halaman 60, UNESCO: 'Kebudayaan minoritas [atau asli] [hendaklah mempunyai] tempat yang lebih baik, bukan hanya di dalam sistem pendidikan, tetapi juga di dalam citra 'kebudayaan nasional' yang setiap negara mencahari untuk memiliki dan merancangnyanya.'
38. Bandingkan dengan 28 C/Resolusi 5.4, **Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy** [1995], (*Deklarasi dan Kerangka Aksi Terpadu untuk Pendidikan Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*), UNESCO, Pasal 19: 'Mempelajari bahasa-bahasa asing menawarkan suatu alat untuk meraih pengertian yang lebih dalam tentang kebudayaan-kebudayaan lain yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan pengertian yang lebih baik antarkomunitas dan antara bangsa-bangsa.'
39. **Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development** [1995]. (*Keberagaman Kreatif Kita: Laporan Komisi Dunia tentang Kebudayaan dan Pembangunan*), UNESCO, halaman 168.

UNESCO memainkan peranan yang penting dalam penyediaan kerangka internasional untuk kebijakan dan praktik pendidikan mengenai isu-isu kunci dan yang rumit. Bahasa dan secara khusus pemilihan bahasa pengantar/pengajaran dalam pendidikan merupakan salah satu keprihatinan itu dan yang sering menimbulkan posisi-posisi yang kontras dan terasa mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tentang identitas atau jatidiri, kebangsaan dan kekuasaan terkait erat dengan penggunaan bahasa-bahasa tertentu di ruang kelas. Terlebih lagi, bahasa itu sendiri memiliki dinamikanya sendiri dan terus-menerus mengalami proses, baik kontinuitas maupun perubahan yang berdampak pada bentuk komunikasi berbagai masyarakat di dalam perkembangannya. Para pembuat kebijakan pendidikan harus membuat keputusan-keputusan yang sulit mengenai bahasa-bahasa, persekolahan dan kurikulum di mana hal-hal yang teknis dan politis sering tumpang-tindih.

Walaupun terdapat alasan-alasan pendidikan yang kuat yang menguntungkan bahasa ibu (atau bahasa pertama), suatu keseimbangan yang hati-hati juga perlu dibuat antara memampukan orang-orang untuk menggunakan bahasa-bahasa lokal atau setempat dalam proses pembelajaran, dan menyediakan kesempatan atau akses untuk bahasa-bahasa komunikasi global melalui pendidikan. Dengan demikian, maka maksud naskah sikap ini adalah untuk mempertimbangkan beberapa isu sentral mengenai bahasa-bahasa dan pendidikan serta menyediakan pedoman dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan itu. Di dalam melakukan hal tersebut, kami menyadari perlunya suatu pernyataan yang jelas tentang kebijakan bahasa terkait dengan pendidikan, khususnya di dalam konteks Pendidikan Untuk Semua dan dalam rangka tujuan-tujuan Dakar yang menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak mempunyai akses untuk pendidikan dasar yang berkualitas dan bahwa terdapat peningkatan 50 persen dalam keaksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015 itu.

Pendidikan
dalam
dunia yang
multibahasa



Naskah
tentang Sikap
UNESCO
mengenai
Pendidikan